

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Ketenagakerjaan menggandengkan istilah pekerja dengan buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dan waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat.¹

Faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional di negara Republik Indonesia. Bahkan sarana yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa salah satunya merupakan faktor tenaga kerja, oleh sebab itu tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.² Permasalahan yang sering muncul dalam dunia perburuhan adalah permasalahan yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, maka tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja.

Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, usaha penyediaan barang maupun jasa semakin kompleks pula dengan melihat berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pesatnya perkembangan usaha di satu sisi dapat dilihat dari gaya hidup dan pola berbelanja masyarakat, adalah bisnis ritel atau bisnis eceran merupakan satu jenis usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut. Bentuk kegiatan perdagangan eceran atau bisnis ritel modern yang memiliki pola perdagangan dengan cara melakukan pembelian barang dengan jumlah besar pada produsen ataupun pada pengimpor baik secara langsung atau melalui grosir seperti Alfamart.

Alfamart merupakan salah satu jenis minimarket yang begitu terkenal di banyak kota bagian Indonesia. Alfamart didirikan pada tanggal

(2). ¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (1) dan

² Djumbadi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

22 Februari 1989 oleh Djoko Susanto PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. selama 20 tahun tetap setia melayani berjuta keluarga Indonesia dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkualitas namun dengan harga terjangkau.³ Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Perseroan) yang memulai usahanya di bidang perdagangan dan distribusi, kemudian pada Tahun 1999 mulai memasuki sektor ritel minimarket. Ekspansi secara eksponensial dimulai perseroan pada Tahun 2002 dengan mengakuisisi 141 gerai Alfaminimart dan membawa nama baru Alfamart. Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari. Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha *ritel*, dengan melayani lebih dari 30 juta pelanggan setiap harinya di hampir 10.300 gerai yang tersebar di Indonesia. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau. Didukung lebih dari 70.000 karyawan menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembukaan lapangan kerja terbesar di Indonesia.

Sistem yang diterapkan perusahaan Alfamart yang tidak menguntungkan karyawan, yaitu adanya pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti *defisit* perusahaan karena terjadi *mines* barang setelah dilakukannya *Stok Opname* (SO) perbulan. Pemotongan minesan barang ini disebut NBH (Nota Barang Hilang) atau sekarang dikenal dengan istilah NSB (Nota Selisih Barang). Nota Selisih Barang (NSB) adalah beban selisih barang-barang di toko yang terakumulasi setelah dilakukannya *Stok Opname* (SO), yakni penentuan selisih stok barang fisik dengan stok barang yang di komputer. Jika terjadi selisih *mines* maka selisih ini pada akhirnya menjadi beban NSB setelah adanya Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yang diberikan perusahaan kepada toko. Beban NSB yang diberikan kepada karyawan bentuknya disesuaikan dengan jabatan yang dipegang oleh karyawan dan dibebankan pada setiap bulannya.

Pemerintah telah mengatur segala yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

³<http://jakakina110.blogspot.com/?m=1>. Diakses pada 1 November 2020.

Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut agar semua pekerja atau buruh mendapatkan hak-haknya dan mendapat perlakuan adil. Pada masa ini semua perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua karyawannya. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan yang dikenal dengan asas *no work no pay*, dengan pengecualian dalam hal tertentu seperti sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, dan lain-lain. Apabila karyawan melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian. Pengusaha atau karyawan yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda apabila hal tersebut diatur secara tegas. Denda kepada pengusaha atau karyawan dipergunakan hanya untuk kepentingan karyawan. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah. Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau bekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijarah* yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.⁴

Konsep sewa menyewa tenaga manusia ini tentunya memiliki rukun maupun persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaannya,

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

seperti adanya pihak penyewa jasa dan pihak penyedia jasa (*aqidain*), akad sewa jasa (*sighat*), dan upah (*ujrah*) yang harus diberikan oleh penyewa jasa kepada penyedia jasa dan manfaat (*manfa'ah*) atau objek akad *ijarah*.⁵ Dari rukun-rukun tersebut memiliki persyaratan tersendiri, misalnya bagi pihak penyewa jasa dan bagi penyedia jasa harus rela melakukan akad, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain dan lain sebagainya.

Hal ini sangat menarik penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana Pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart dengan memperdalam mengenai Nota Selisih Barang (NSB) perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PENGATURAN NOTA SELISIH BARANG (NSB) PADA ALFAMART RAYA BEBER KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Rumusan Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya sistem penggantian selisih barang yang hilang dengan sistem pemotongan upah pekerja.
- b. Adanya proses *audit stock opname* (SO) setiap satu bulan.
- c. Pemotongan upah pekerja diterapkan kepada semua pekerja.
- d. Adanya pemotongan upah pekerja setiap bulannya.
- e. Tidak adanya bukti yang akurat mengenai hilangnya barang baik dari internal, eksternal dan dari vendor.
- f. Ada dua cara pemotongan beban Nota Selisih Barang (NSB) pertama, dengan langsung memotong semua beban NSB

⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011), 80-81.

yang dihitung setiap bulan, kedua, pemotongan sebagian beban NSB yang dihitung dan sebagian ditanggihkan.

2. Batasan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar belakang di atas, maka penulis hanya membahas mengenai pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) di Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan pelaku bisnis dimanapun berada, khususnya Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah supaya dalam setiap kegiatan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat umum tentang pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan diperkuliahan.

b. Bagi Perusahaan dan Masyarakat

Diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan lagi bagi perusahaan berupa ide atau gagasan untuk pengembangan pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan dengan strategi pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Ikhwan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waralaba Minimarket Alfamart (Studi Kasus di Minimarket Alfamart Jl. Slamet Riyadi No. 203, Kartasura, Sukoharjo)”. Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa masing-masing pihak baik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Franchisor) dan CV. Mulya Indah (Franchisee) memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Baik modal, kerja, pembagian hasil dan rugi tidak sama, hal ini sesuai dengan *syirkah 'Inan* dengan catatan bentuk modal tidak harus dalam bentuk uang, tetapi boleh dengan aset perniagaan, barang komoditas, jasa dan lain-lain yang dapat dinilai secara ekonomi. Dan dalam prakteknya, adanya pembelian hak merk alfamart yang merupakan syarat terjadinya *syirkah*. Franchisee dapat menggunakan hak merk tersebut hingga batas waktu tertentu yang telah disepakati. Dan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian waralaba tidak ditemukan adanya perselisihan atau suatu wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, bila terjadi

perselisihan atau wanprestasi, maka akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat hingga ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Agung Nugroho yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang”. Penelitian ini disimpulkan, bahwa selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Kota Semarang disebabkan karena kelalaian karyawan dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau akadnya *fāsid*, jual-beli *gharar* memang dilarang dalam Islam, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. Seperti selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Kota Semarang memang ditemukan unsur *gharar-nya* yakni dalam akad, namun unsur *gharar-nya* tidak menjadikan jual-beli ini dilarang, karena unsur *gharar* yang ada pada jual beli ini ringan termasuk *gharar* yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam jual-beli diantara keduanya saling ridha tidak ada paksaan.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Susanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomart Fajar Bulan Lampung Barat)”. Penelitian ini disimpulkan, bahwamengenai tatacara kerja, upah, hak dan kewajiban serta aturan-aturan lainyang berlaku di perusahaan. Jika terjadi barang rusak atau hilang akibat kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai batas maksimal, maka seluruh karyawan secara bersama bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji bulanan sesuai dengan jabatannya. Tinjauan hukum Islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan itu boleh diberlakukan. Meskipun ada ahli fiqih melarang denda disebabkan barang rusak atau

⁶Muhammad Fauzan Ikhwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waralaba Minimarket Alfamart (Studi Kasus di Minimarket Alfamart Jl. Slamet Riyadi No. 203, Kartasura, Sukoharjo)*, skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, skripsi dipublikasikan.

⁷M. Agung Nugroho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015. Skripsi dipublikasikan.

hilang dalam waktu bekerja bukan karena, faktor kelalaian. Dengan alasan hilang atau rusaknya barang akibat kelalaian karyawan dan tertuang dalam perjanjian. Adanya sanksi atas kelalaian kerja, memberi manfaat (*maslahah*) agar karyawan tertib dan tanggung jawab dalam bekerja sesuai kewenangan yang telah diberikan perusahaan.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfahatul Arifiyah yang berjudul: “Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)”. Penelitian ini disimpulkan, bahwa kontrak kerja atau perjanjian kerja (*akad ijārah af’āl atau amal*) yaitu dengan menggunakan perjanjian tertulis, kedua, kontrak kerja terbagi menjadi dua *shift*. *Shift* pertama pukul 06.00 - 15.00 WIB (sore hari) dan *shift* kedua pukul 15.00 – 23.00 WIB (malam hari), ketiga, penetapan upah atau gaji sebesar dua juta lima ratus yang diberikan setiap bulan sekali, keempat, pemotongan gaji terjadi jika *mines* “NBH”, maka dengan otomatis gaji karyawan akan terpotong (jika melebihi batas toleransi limaratus ribu rupiah). Praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota barang hilang di Alfamrt Puri Delta 03 Kota Semarang ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan teori *ijarah*, menyalahi “*syarat al-ṣiḥah* (syarat sahnya kontrak kerja)”, yaitu “kerelaan kedua belah pihak (pihak karyawan dan pihak perusahaan). Karena, sebagai pekerja khusus (*Ajir Khas*), ia tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yangdibebankan kepadanya. Hal ini karena, kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat amanāh (*yad amanah*) bukan *ḍamanah*.⁹

⁸Deni Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomart Fajar Bulan Lampung Barat)*, Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.skrripsi dipublikasikan.

⁹Lutfahatul Arifiyah , *Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)*. Jurusan Hukum Ekonomi Islam Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019. Skripsi dipublikasikan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Rita Fatmawati yang berjudul: “Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)” Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)”. Penelitian ini disimpulkan, Dalam PP.No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang terkait tentang pemotongan upah akibat barang hilang tercantum dalam pasal 57 dan pasal 58. Isi dari pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa pemotongan upah terhadap buruh/tenagakerja dapat dilakukan karena faktor adanya denda, ganti rugi, uang muka. Dalam pasal 58 dijelaskan tentang jumlah pemotongan upah yakni jumlah keseluruhan pemotongan upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh. Dalam hal pemotongan upah/gaji atas hilangnya barang, hukum Islam membolehkan karena dalam aturan itu lebih banyak *maslahat* (manfaatnya) dari pada *mudharatnya*. Terkecuali pemotongan upah/gaji tersebut dilakukan secara sepihak atau tidak dibacakan dalam perjanjian maka itu tidak disahkan.¹⁰

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti akan membuat sebuah penelitian dari penelitian sebelumnya. Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas adalah bentuk subjek dan objeknya serta tempat penelitian yang akan penulis teliti sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

¹⁰Neneng Rita Fatmawati, *Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)” Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2018. Skripsi dipublikasikan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan menggandengkan istilah pekerja dengan buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dan waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat.¹²

Sistem pemotongan selisih barang disebut Nota Selisih Barang (NSB). NSB adalah beban kehilangan barang-barang di toko yang terakumulasi setelah dilakukannya *Stok of Name (SO)*, yakni penentuan selisih stok barang fisik dengan stok barang yang di komputer. Jika terjadi selisih maka selisih ini pada akhirnya menjadi beban NSB setelah adanya Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yang diberikan perusahaan kepada toko. Beban NSB yang diberikan kepada karyawan bentuknya disesuaikan dengan jabatan yang dipegang oleh karyawan dan dibebankan pada setiap bulannya.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 88 ayat 1).¹³

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* (upah). *Al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, sehingga *ijarah* atau *al-ajru* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat, baik dalam hal sewa tenaga atau jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan imbalan, upah atau kompensasi tertentu. Persyaratan bagi upah atau *ujrah*, yaitu upah harus

¹¹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

¹³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1

berupa harta tetap yang dapat diketahui, dan upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah bagi pengelola *ritel* dengan menempati *ritel*nya. Sedangkan persyaratan bagi manfaat atau objek akad, yaitu pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan syari'at. Apabila dalam akad disepakati bahwa pekerja harus bertanggung jawab (*al-dhaman*) dalam hal terjadi kerusakan barang karena kerja yang dilakukannya, ulama *Malikiyah*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah al-Dusuqi*, berpendapat bahwa syaratnya batal dan akad *ijarah*-nya *fasad*.¹⁴

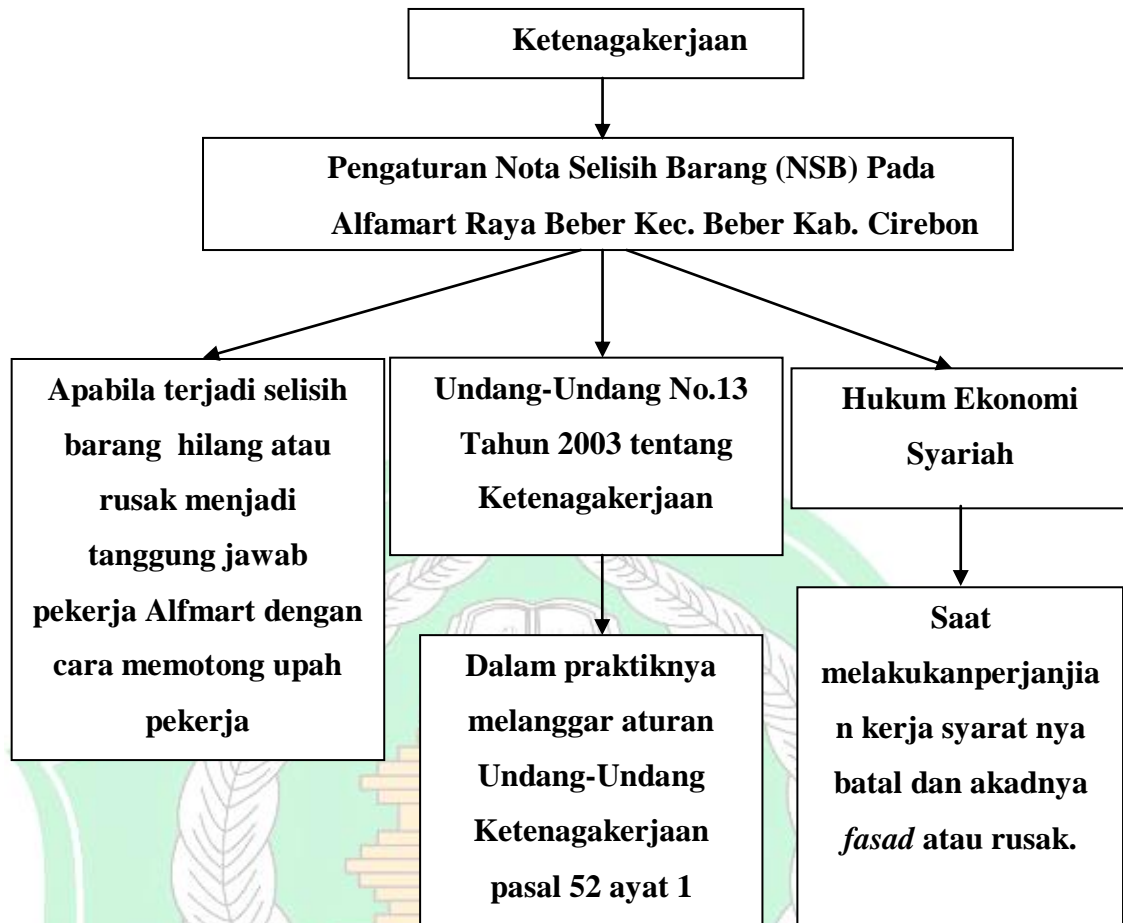
Islam sangat memperhatikan kepentingan pengusaha atau buruh, baik dalam hubungan kerja antara pengusaha muslim dengankaryawannya, selalu dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling membutuhkan dan tolong-menolong. Pengusaha menolong karyawan menyediakan lapangan kerja, karyawan menerima rezeki berupa upah dari majikannya. Demikian pula bawahan menyediakan tenaga dan kemampuannya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan, sehingga atasannya atau majikannya menerima rezeki berupa laba berkat kerja sama dengan bawahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ..." (Q.S Al-Maidah:2)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut:

¹⁴Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 76.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam menyimpulkan data.¹⁵

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dan peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data-data dan berbagai informasi.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

¹⁵Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 34.

¹⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 24.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber yang beralamat di Jalan Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan November sampai dengan bulan Februari 2021.

3. Subyek dan obyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber dan obyek dalam penelitian ini adalah sistem pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan dasar untuk suatu kajian.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Data primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Alfamart Raya Beber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis.¹⁷

5. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati sebuah objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan teknik ini akan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari

¹⁷ <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org>. (Diakses pada 12 Agustus 2020).

dekat.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung terhadap praktik mengenai pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dimana tujuannya untuk mengumpulkan informasi dengan caratanya jawab antara peneliti dan informan.¹⁹ Dalam hal ini maka wawancara akan ditujukan kepada kepala toko, asisten kepala toko dan *crew-crew* Alfamart Raya Beber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapat dari dokumen-dokumen pada Alfamart, brosur, internet dan juga data lainnya yang berkaitan dengan pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

6. Analisis data

Metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data ke dalam kategori, menjabarkan dan juga membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini, analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai

¹⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

¹⁹<http://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>. (Diakses Pada 27 Juni 2020).

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

pengaturan Nota Selisih Barang pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebonperspeftif Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan menjabarkan beberapa BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. .

BAB II LANDASAN TEORI merupakan kerangka teoritis yang dimana di dalamnya memaparkan tentang deskriptif teori yang terdiri dari pengertian ketenagakerjaan, hubungan kerja dan perjanjian kerja, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian kerja, tenaga kerja menurut hukum Islam, Nota Selisih Barang (NSB), dan perlindungan tenaga kerja.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN menjelaskan gambaran umum tentang Alfamart yang terhimpun di dalamnya mengenai sejarah singkat Alfamart di Indonesia, sejarah Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, kilasan umum yang terdiri dari lokasi/kondisi objektif, serta perjanjian sistem Nota Selisih Barang (NSB) yang dilakukan oleh Alfamart Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN yaitu menguraikan tentang sistem pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pandangan hukum Islam terhadap pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) pada Alfamart Raya Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan baik untuk penulis, pihak pengelola dan masyarakat umum.

